

**PENGARUH KORUPSI DAN PENDAPATAN NASIONAL TERHADAP
PEMBANGUNAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA ISLAM**

Andri Martiana

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

email: andri.martiana@gmail.com

Abstract

In an effort to implement the economic development of a country in order to improve the welfare of people in the entire region, there are some fundamental problems, including the problem of corruption and issues of growth as increased ability to produce the goods and services in various fields are expanding. This study aimed to analyze the effects of corruption and the national income to economic development in the Islamic countries members of the OIC. Data from 52 countries were analyzed with multiple linear regression where the results showed that the variables of corruption is significantly and positively effect of 42.1% to economic development and national income variables significantly and positively effect of 0.5% on economic development. Taken together (simultaneously), corruption and national income variables significantly have positive effect 33.0% on the economic development variable.

Keywords: *Corruption, national income, economic growth, economic development.*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayahnya. Pembangunan juga dapat diartikan sebagai perubahan yang positif. Perubahan itu direncanakan dan arahnya tertuju pada kemajuan. (Supramono, 1997: 1)

Usaha pembangunan ini di antaranya mencakup perluasan dasar ekonomi dengan diversifikasi pertanian, pengembangan produksi ekstraktif (pertambangan, kehutanan) pengembangan industri sekunder (manufaktur dan konstruksi) dan kegiatan sektor tersier (jasa-jasa) serta penciptaan lapangan kerja produktif di bidang-bidang kegiatan yang meluas (Djojohadikusumo, 1994: xvii).

Dari data Human Development Index United Nations Development Programme (UNDP) menyatakan bahwa 40 negara yang ada di dunia memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah dimana 23 (57,5%) di antaranya adalah negara-negara Islam. Hal ini menjadi satu catatan tersendiri mengingat Islam sebagai agama dengan misi rahmatan lil 'Alamin telah memberikan perhatian besar terhadap pembangunan ekonomi pada negara (Q.S. Al-Qashash: 77).

Islam sangat mendorong terciptanya lingkungan yang mendukung terciptanya masyarakat Islam yang bertujuan mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial ekonomi. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan kondisi kesamarataan dimana setiap orang (baik pria maupun wanita) dapat memaksimalkan kapasitas intelektual mereka, melestarikan dan meningkatkan kesehatan mereka, dan secara aktif memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk tujuan ini, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi serta keadilan ekonomi dan sosial merupakan elemen dasar dalam sistem ekonomi Islam dimana Islam telah memberikan pedoman yang rinci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera (Askari dan Rehman, 2013: 300).

Djojohadikusumo (1994: xvii) mengungkapkan bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan ini terdapat beberapa permasalahan pokok, diantaranya adalah masalah pertumbuhan sebagai peningkatan kemampuan memproduksi mengenai barang dan jasa di berbagai bidang yang semakin meluas. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dapat dilihat dari pendapatan nasional yang diukur dengan

produk domestik bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dari data World Bank tahun 2016 disebutkan bahwa 15 dari 23 negara dengan penghasilan terendah adalah negara-negara Islam.

Tabel 1.1 Pendapatan Nasional Bruto (PNB) negara-negara Islam anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI)

<i>Category</i>			
<i>High Income</i>	<i>Upper Middle Income</i>	<i>Lower Middle Income</i>	<i>Low Income</i>
<i>Bahrain</i>	<i>Albania</i>	<i>Bangladesh</i>	<i>Afghanistan</i>
<i>Brunei Darussalam</i>	<i>Algeria</i>	<i>Cameroon</i>	<i>Benin</i>
<i>Kuwait</i>	<i>Azerbaijan</i>	<i>Côte d'Ivoire</i>	<i>Burkina Faso</i>
<i>Oman</i>	<i>Gabon</i>	<i>Djibouti</i>	<i>Chad</i>
<i>Qatar</i>	<i>Iran, Islamic Rep.</i>	<i>Egypt, Arab Rep.</i>	<i>Comoros</i>
<i>Saudi Arabia</i>	<i>Iraq</i>	<i>Guyana</i>	<i>Gambia, The</i>
<i>United Arab Emirates</i>	<i>Jordan</i>	<i>Indonesia</i>	<i>Guinea</i>
	<i>Kazakhstan</i>	<i>Kyrgyz Republic</i>	<i>Guinea-Bissau</i>
	<i>Lebanon</i>	<i>Mauritania</i>	<i>Mali</i>
	<i>Libya</i>	<i>Morocco</i>	<i>Mozambique</i>
	<i>Malaysia</i>	<i>Nigeria</i>	<i>Niger</i>
	<i>Maldives</i>	<i>Pakistan</i>	<i>Sierra Leone</i>
	<i>Suriname</i>	<i>Senegal</i>	<i>Somalia</i>
	<i>Tunisia</i>	<i>Sudan</i>	<i>Togo</i>
	<i>Turkey</i>	<i>Syrian Arab Republic</i>	<i>Uganda</i>
	<i>Turkmenistan</i>	<i>Tajikistan</i>	
		<i>Uzbekistan</i>	
		<i>Yemen, Rep.</i>	

Sumber: Data World Bank diolah

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari 56 negara-negara Islam anggota OKI yang terdaftar di World Bank 59% di antaranya termasuk negara dengan penghasilan rendah. Hal ini menjadi satu catatan tersendiri bagi negara-negara muslim untuk dapat meningkatkan pendapatan nasionalnya guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Selain masalah pertumbuhan hal lain yang dapat menghambat proses pembangunan ekonomi adalah adanya praktek korupsi dalam suatu pemerintahan. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Myrdal bahwa korupsi merupakan hambatan besar bagi

pembangunan (Hamzah, 2005: 22). Dimana tindakan ini dapat memantapkan dan memperbesar masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha yang mengakibatkan kurang tumbuhnya pasaran nasional. Korupsi juga mempertajam permasalahan masyarakat dimana kesatuan negara bertambah lemah, martabat pemerintah menjadi turun sehingga tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik. di samping itu korupsi juga mengakibatkan turunnya disiplin sosial dengan adanya uang suap yang bisa dianggap sebagai semir pelicin salah satunya dalam layanan administrasi. Padahal, dana yang telah dikorupsi tersebut dapat disalurkan dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan proyek pembangunan yang membutuhkan, dimana tentu hasilnya akan menambah tingkat kesejahteraan masyarakat. (Supramono, 1997: 3-4).

Terkait dengan korupsi pada negara-negara di dunia, data Transparency International menyatakan bahwa tujuh negara dengan indeks persepsi korupsi terendah (yang berarti merupakan negara terkorup) di dunia adalah negara-negara Islam. Hal ini menjadi hal yang sangat ironis mengingat Islam merupakan negara yang sangat tegas terhadap tindakan korupsi sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT. Dalam Q.S. Al-Baqarah: 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188)

Korupsi sebagaimana tersebut dalam ayat di atas dapat dimasukkan dalam kategori kasus memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, dimana praktek tersebut dilarang karena dapat merugikan orang lain. Pemberantasan korupsi dalam Islam dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan dalam akuntabilitas transenden serta pembangunan karakter melalui latihan moral

kebijakan dan menghindari tindak kejahatan dalam setiap aspek kehidupan (Iqbal dan Lewis, p. 1). Korupsi juga merupakan tindak pelanggaran peradilan yang memiliki dampak negatif terhadap kepercayaan sosial (You 2007, p. 28-29). You (2007) menambahkan bahwa dengan menurunnya kepercayaan sosial, biaya transaksi lebih tinggi dan hal tersebut menjadikan sulitnya mengatasi berbagai masalah tindakan kolektif. Menurut Chapra (1993, p. 5), keadilan sosial merupakan hal pokok dalam konsep pembangunan dalam Islam dimana keadilan sosial ini mencakup transparansi, distribusi kekayaan yang merata, penyediaan kebutuhan dasar, dan perlindungan bagi pihak yang lemah terhadap eksploitasi ekonomi oleh pihak yang kuat.

Faktor mental yang tidak sehat merupakan faktor yang paling dominan di antara faktor-faktor lainnya yang mendorong perbuatan korupsi. Pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan oleh pegawai negeri dengan sangat rapih dan dengan mata rantai yang sangat kuat. Perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan/perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan menunjukkan akhlak yang rendah (Prakoso, 1987: 427)

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh korupsi dan pendapatan nasional terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara Islam pada tahun 2014.

2. KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pembangunan Ekonomi

2.1.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi

Istilah pembangunan ekonomi terkadang disalahartikan sebagai pertumbuhan ekonomi. Hagen (1986) dalam bukunya *The Economics of Development* menyatakan bahwa istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi tidaklah sama. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai pertumbuhan yang berkelanjutan dari pendapatan per kapita melalui peningkatan tehnik produksi dalam suatu negara. Sedangkan pembangunan

ekonomi meliputi berbagai perubahan ekonomi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi tersebut.

Menurut Harrison (1993: 175), definisi pembangunan jauh lebih luas dari sekedar dimensi produktifitas eksistensi manusia. Hal ini juga mencakup dimensi sosial, terutama kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk kemajuan di sektor ini, dan, seperti dengan kemajuan ekonomi, inovasi dan kreativitas merupakan akar dari kemajuan sosial. Orang-orang yang memahami kebijakan yang memperluas dan meningkatkan pelayanan sosial yang demikian sebanding dengan dampak pembangunan mereka kepada pengusaha industri, seperti perencana sektor publik, administrator, teknisi, dan pekerja kerah biru dengan rekan-rekan sektor swasta mereka.

2.1.2 Fenomena Perekonomian di Masyarakat Negara-negara Berkembang

Perekonomian menjadi salah satu masalah krusial pada negara-negara berkembang. Tingkat hidup dan mutu kehidupan yang rendah, lagipula seakan-akan terbelenggu dalam keadaan terkekang dan daya beli yang rendah menjadi kendala terhadap kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mencakup pangan, sandang, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan. Hal itu masih dipertajam oleh penambahan penduduk dan angkatan kerja yang tidak terampil, sehingga di sejumlah negara berkembang sebagian besar penduduknya berada dalam keadaan yang ditandai oleh “kemiskinan masal” (mass poverty).

Gejala pengangguran yang terselubung yaitu *disguished unemployment* di daerah pedesaan dan urban *underemployment* di lingkungan kota. Satu sama lain sebagai akibat kurang tersedianya lapangan kerja yang produktif penuh (yang membawa hasil kerja dan nafkah mata pencaharian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar).

Masalah urbanisasi dan golongan “*informal*” ialah bahwa sebagian golongan tenaga kerja di antara penduduk desa mengalir ke kawasan kota (*rural-urban migration*). Sebagian besar jumlah tenaga kerja itu tidak terampil dan tidak mendapat pekerjaan yang

sepenuhnya produktif, bahkan tidak ada kepastian mengenai jenis pekerjaan sehari-hari. Mereka lazimnya kini dianggap sebagai golongan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang bersifat “informal” ataupun dengan pendek sebagai “golongan informal”. (Djojohadikusumo, 1994: xvi)

Kebanyakan negara berkembang mempunyai struktur dan corak suatu “ekonomi terbuka” (open economy): senantiasa dirasakan pengaruh hubungan timbal-balik antara serangkaian faktor eksternal dalam lalu-lintas ekonomi internasional (khususnya perdagangan dan pembayaran internasional) dan kekuatan ataupun kelemahan yang terkandung dalam masyarakat sendiri. Perdagangan internasional dan lalu-lintas modal sangat mempengaruhi pendapatan nasional, penerimaan pemerintah, dan penerimaan devisa.

Usaha pembangunan dan perubahan struktural mencakup perluasan dasar ekonomi dengan diversifikasi pertanian, pengembangan produksi ekstraktif (pertambangan, kehutanan) pengembangan industri sekunder (manufaktur dan konstruksi) dan kegiatan sektor tersier (jasa-jasa) serta penciptaan lapangan kerja produktif di bidang-bidang kegiatan yang meluas.

2.1.3 Permasalahan dalam Pembangunan

Kerangka acuan untuk memantau, mengkaji, dan menilai usaha pembangunan secara konsisten dalam perjalanan waktu meliputi empat segi permasalahan pokok:

- Pertumbuhan sebagai peningkatan kemampuan berproduksi mengenai barang dan jasa di berbagai bidang yang semakin meluas;
- Lapangan kerja yang bersifat produktif penuh;
- Lalu lintas perdagangan dan pembayaran internasional;
- Kestabilan dalam perkembangan harga dalam negeri (pengendalian inflasi).

2.1.4 Pendidikan dan Pembangunan

Telaah mengenai peran pendidikan dan pembangunan biasanya berpangkal pada saran pendapat bahwa pendidikan merupakan prasyarat untuk meningkatkan martabat manusia. Melalui pendidikan warga

masyarakat mendapat kesempatan untuk membina kemampuannya dan mengatur kehidupannya secara wajar. Perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berarti membuka kesempatan ekonomis untuk mengupayakan perbaikan dan kemajuan dalam kehidupan masyarakat. Satu sama lain akan mendukung terlaksananya pemerataan pendapatan masyarakat. (Djojohadikusumo, 1994: 214)

Pembinaan mutu sumber daya manusia dalam rangka pembangunan ekonomi harus diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan dan meluaskan keterampilan teknis, keahlian profesional, dan kecerdasan akademis (technical skills, professional expertise and academic qualities) dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. (Djojohadikusumo, 1994: 215)

2.1.5 Kesehatan Rakyat dan Pembangunan

Bidang kesehatan termasuk salah satu kategori prioritas ekonomi yang utama dan merupakan unsur pokok dalam kualitas sumber daya manusia. Masalahnya berkisar pada hubungan timbal-balik antara kesehatan rakyat dan proses pembangunan. Oleh WHO (World Health Organization) diungkapkan bahwa paham kesehatan menyangkut keadaan yang pada umumnya menunjukkan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Pengertian demikian harus dianggap terlalu luas, oleh karena dalam perkembangannya sulit sekali untuk diamati dan dipantau dengan tolak ukur-tolak ukur yang agak pasti. Dalam pandangan umum, biasanya kesehatan diartikan sebagai keadaan dimana tidak dialami penyakit yang bersifat kronis yang cenderung meluas dan dimana cacat tubuh maupun cacat jiwa hanya diderita dalam kalangan terbatas.

Sebab-musabab bagi penyakit-penyakit menular yang bersifat kronis maupun bagi kematian pprematurn di antara golongan usia muda dapat dibagikan dalam empat kategori:

1. Faktor demografis
2. Kekurangan gizi (malnutrition)
3. Lingkungan hidup yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi;
4. Kurang tersedianya jaringan pelayanan kesehatan, baik secara kuantitatif maupun dalam arti kualitatif. (Djojohadikusumo, 1994: 221)

2.2 Korupsi

2.2.1 Pengertian Korupsi

Kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin: ‘Corruptie’ yang berarti penyuapan, perusakan moral, perbuatan yang tidak beres dalam jawatan, pemalsuan dan sebagainya. (Ensiklopedia Indonesia, NV Penerbitan W. Van Hoeve Bandung’s –Graven-hage) Dalam kamus umum Bahasa Indonesia buah tangan Poerwadarminta (1976), kata “korupsi” diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Prakoso, dkk, 1987: 391)

Dari segi semantik, kata “korupsi” berasal dari bahasa Inggris Corrupt, dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu Com yang berarti bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Secara istilah bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Pada prakteknya, korupsi dapat dilihat sebagai penerimaan uang yang berhubungan dengan jabatan tanpa tercatat dalam administrasi. Berbagai kamus bahasa Indonesia mengisyaratkan korupsi dengan sangat sederhana, yakni tindakan atau perbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum dan atau aparat negara untuk kepentingan pribadi dengan memperkaya diri sehingga menyebabkan kerugian pada negara (Santoso, 2011: 5-6)

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “corruptio” dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. (Danil, 2012: 3)

2.2.2 Ciri-ciri Korupsi

Menurut Santoso (2011: 8-9) tindakan korupsi memiliki ciri khas di antaranya sebagai berikut:

- a. Dilakukan secara berjamaah lebih dari seorang.
- b. Tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri, birokrat atau aparat negara saja, pihak

organisasi swastapun bisa terjangkit penyakit ini.

- c. Korupsi tidak selalu dalam bentuk uang tunai, namun dapat berupa tip, “sogokan”, suap-menyuap, uang dengar, salam tempel, atau dalam bentuk benda, barang tertentu.
- d. Biasanya tidak transparan, kecuali yang telah membudaya.
- e. Melibatkan elemen kewajiban dan simbiosis mutualisme kepentingan berbagai pihak terkait.
- f. Tindak pidana ini selalu merugikan baik pada badan publik, masyarakat umum maupun negara.

g. Korupsi pasti menyimpang dari norma-norma tugas, kewajiban dan pertanggungjawaban dalam tatanan sosial.

Syed Hussein Alatas menambahkan beberapa ciri dari korupsi, yaitu (Danil, 2012: 7-8):

- a. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum;
- b. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas, dan mereka mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu;
- c. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan;
- d. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
- e. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu;

2.2.3 Bentuk dan Pola Korupsi (Santoso, 2011: 23-47)

Bentuk dan pola korupsi yang biasa dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Merugikan keuangan negara.
2. Tindak suap-menyuap
3. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang.
4. Pemerasan.
5. Kecurangan kontraktor.
6. Pengadaan (kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan.
7. Gratifikasi (pemberian hadiah).

Benveniste memberikan pemahaman terhadap korupsi atas empat jenis (Danil, 2012: 10-12)

- a. Discretionery corruption, yakni korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan

dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh anggota organisasi.

b. *Illegal corruption*, yakni suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.

c. *Mercenary corruption*, yakni jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

d. *Ideological corruption*, yakni jenis korupsi illegal maupun discretionary yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

2.2.4 Akibat Korupsi

Menurut Andi hamzah (1982) sebagaimana disadur oleh Prakoso (1987: 395-396), korupsi membawa akibat negatif antara lain:

1. Korupsi memantapkan dan memperbesar masalah-masalah yang menyangkut kurangnya hasrat untuk terjun di bidang usaha dan mengenai kurang tumbuhnya perasaan nasional.

2. Korupsi mempertajam permasalahan masyarakat plural sedang bersamaan dengan itu kesatuan negara bertambah lemah. Juga karena turunnya martabat pemerintah, tendensi-tendensi itu membahayakan stabilitas politik.

3. Korupsi mengakibatkan turunnya disiplin sosial. Uang suap itu tidak hanya memperlancar prosedur administrasi tetapi biasanya juga berakibat adanya kesengajaan untuk memperlambat proses administrasi agar dengan demikian dapat menerima uang suap. Di samping itu, pelaksanaan rencana-rencana pembangunan yang sudah diputuskan, dipersulit atau diperlambat karena alasan-alasan yang sama. Korupsi pada umumnya mengakibatkan disiplin yang rendah, merugikan masyarakat dan menurunkan wibawa pemerintah.

Lebih spesifik lagi, Prakoso (1987: 399-406) menyatakan bahwa korupsi dapat berakibat negatif terhadap pembangunan nasional yang dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu:

- Ditinjau dari segi politik

1. Kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah

Suatu pemerintah dimana pejabat-pejabatnya hanya korup akan mengakibatkan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah tersebut. Suatu negara yang memberikan bantuan ekonomi kepada negara yang pejabat-pejabatnya banyak yang korup sehingga bantuan tersebut tidak memenuhi sarannya seperti apa yang diharapkan oleh negara yang memberikan bantuan tadi, bisa menyebabkan pemberian bantuan selanjutnya akan terhambat, yang mengakibatkan pembangunan ekonomi nasional menjadi macet dan terlantar sehingga mengganggu stabilitas perekonomian negara di samping mengganggu stabilitas politik. Akibat korupsi maka negara yang memberi bantuan tidak bergairah lagi untuk melanjutkan bantuannya.

2. Kurangnya kewibawaan pemerintah
Akibat lain dari korupsi ialah kurangnya wibawa pemerintah dimana anggota masyarakat bersifat apatis terhadap segala anjuran-anjuran dan tindakan pemerintah. Sifat-sifat yang demikian ini jelas bahwa ketahanan nasional akan rapuh karena anggota masyarakat merasa dirinya tidak ikut bertanggung jawab dalam keutuhan nasional atau negara. dalam situasi masyarakat yang demikian ini akan dapat dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik atau pihak ketiga lain yang tidak bertanggung jawab untuk merongrong kewibawaan pemerintah.

• Ditinjau dari segi ekonomi

1. Pengaruh terhadap pendapatan negara

Pendapatan negara diperoleh antara lain dari sektor pungutan bea masuk dan bea keluar serta penerimaan pajak. Penerimaan atas dua faktor ini digunakan untuk menunjang pembangunan dan pembinaan bangsa. Pendapatan negara dapat berkurang apabila pungutan bea masuk dan bea keluar dan penerimaan pajak tidak dapat diselamatkan karena adanya penyelundupan dan penyelewengan pajak-pajak negara oleh oknum-oknum pada kedua sektor tersebut salah satunya dengan adanya korupsi.

2. Kebijakan bidang perkreditan

Adanya korupsi dalam pelaksanaan pemberian kredit dapat mengakibatkan pemberian kredit yang tidak adil yang

menimbulkan kegiatan investasi yang tidak merata.

- Ditinjau dari segi HANKAMNAS

Kepekaan security dan intelligence sangat dibutuhkan demi kestabilan dan ketahanan nasional dimana kepekaan ini harus dimiliki oleh seluruh masyarakat. Akan tetapi hal ini akan bisa berkurang kegiatannya dan kepekaannya jika masyarakat itu bisa terpengaruh oleh uang atau materi lain untuk melalaikan kewajibannya.

- Ditinjau dari segi mental

Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa korupsi dapat merusak mental pejabat pemerintah. Segala sesuatu akan dilihat dari kaca mata materi saja sehingga lupa akan tugasnya sebagai pejabat pemerintah. Pejabat-pejabat yang bermental korupsi berpikir dalam hatinya mengenai apa yang bisa diambil negara dan bangsa ini. Sesuatu hal yang sangat berbahaya lagi adalah jika sampai generasi muda pada suatu negara mencontoh sifat korupsi yang berjangkit dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi maka cita-cita untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur akan semakin jauh dan tipis untuk dapat tercapai.

- Ditinjau dari segi hukum

Jika hukum dan keadilan pada suatu negara sudah dapat diperjual-belikan, maka hal tersebut menyebabkan pembangunan dan pembinaan hukum nasional akan terhambat. Hal ini dikarenakan mental dan karakter para pejabat hukum merupakan faktor utama bagi pembinaan hukum nasional dan masyarakat adil dan makmur.

Santoso (2011: 11-22) menambahkan bahwa korupsi dapat memberikan dampak negatif diantaranya adalah:

1. Penegakan hukum dan pelayanan masyarakat yang timpang.
2. Terhambatnya pembangunan
Pembangunan di segala bidang terbengkalai jika para koruptor dibiarkan mencuri anggaran untuk pembangunan. Kegiatan yang mestinya cukup guna membangun fisik dengan kualitas serta kuantitas memadai menjadi terhambat dengan adanya tindak korupsi ini.
3. Matinya demokrasi

Hal ini salah satunya adalah dengan adanya praktek money politic dalam proses pemilihan wakil rakyat pemangku kebijakan.

4. Ekonomi yang carut-marut.
5. Keresahan, ketidakadilan, dan prestasi yang percuma.

2.2.5 Usaha Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Koentjaraningrat memandang korupsi sebagai salah satu kelemahan pembangunan di mana untuk menanggulangnya bisa dilaksanakan empat hal yaitu:

1. Dengan memberi contoh yang baik;
2. Dengan memberi perangsang-perangsang yang cocok;
3. Dengan persuasi dan penerangan; dan;
4. Dengan pembinaan dan pengasuhan suatu generasi yang baru untuk masa yang akan datang sejak kecil dalam kalangan keluarga (Hamzah, 2005: 22-23)

Agar supaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memperoleh hasil guna, Prakoso, dkk (1987: 427-429) berpendapat bahwa perlu diambil langkah-langkah berikut:

1. Dalam menunjuk atau mengangkat pegawai negeri untuk menduduki jabatan posisi kunci perlu dilakukan secara selektif salah satunya dengan memperhatikan persyaratan adanya mental yang sehat serta mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kelangsungan Pembangunan Nasional.
2. Perlu adanya peningkatan fungsi pengawasan dan tata kelola keuangan/kekayaan negara yang dilakukan secara konsepsional dan terpadu agar tidak memberi peluang terjadinya kebocoran-kebocoran yang merangsang dilakukannya perbuatan korupsi.
3. Perlu dibentuk suatu badan khusus dalam rangka tindak pidana serta usaha mengembalikan kerugian-kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi.
4. Penjatuhan tindak pidana korupsi, di samping harus dapat menimbulkan rasa jera pada pelakunya (terpidana), juga

harus dapat memberi dampak yang lebih jauh yaitu berkembangnya sanksi sosial dan sanksi moral, sehingga timbul rasa malu dan takut melakukan perbuatan korupsi.

5. Meningkatkan gaji/pendapatan pegawai pemerintahan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
6. Memberi penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat sehingga menyadari akan bahayanya akibat perbuatan korupsi bagi kelangsungan pembangunan nasional, dan dengan maksud agar warga masyarakat turut pula membantu dan berpartisipasi dalam rangka pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui saluran hukum.

Gunner Myrdal (Hamzah, 2005: 247) juga menerangkan bahwa jalan untuk memberantas korupsi di negara-negara berkembang ialah:

1. Menaikkan gaji pegawai rendah (dan menengah);
2. Menaikkan moral pegawai tinggi;
3. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapat resmi atau legal.

2.3 Pendapatan Nasional

Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu negara salah satunya adalah dengan melihat pendapatan nasional negara tersebut. Pendapatan nasional suatu negara dapat diukur dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. PDB mengukur dua hal sekaligus, yaitu pendapatan total semua orang dalam perekonomian dan jumlah pembelanjaan untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian. (Mankiw, dkk, 2013: 4)

Produk Domestik Bruto (PDB) menurut Mankiw, dkk (2013: 10) adalah nilai pasar dari seluruh barang dan jasa jadi yang diproduksi di suatu negara pada periode tertentu. (Mankiw, dkk: 6) komponen-komponen PDB (yang dilambangkan dengan Y) dari segala jenis pembelanjaan yaitu konsumsi (C), Investasi (I), belanja pemerintah (G), dan ekspor neto (NX). Adapun persamaannya dapat ditulis:

$$Y = C + I + G + NX^*$$

*Keterangan:

Konsumsi : pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga dengan

pengeualian pembelian rumah baru.

Investasi : pengeluaran untuk peralatan modal, persediaan, dan bangunan atau struktur, termasuk belanja rumah tangga untuk rumah baru.

Belanja-Pemerintah : pembelanjaan untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah

Ekspor neto : pembelian barang produksi domestik oleh warga asing (ekspor) dikurangi dengan pembelian barang asing oleh warga domestik (impor).

PDB tidak secara langsung mengukur hal-hal yang membuat hidup berarti, namun PDB mengukur kemampuan seseorang untuk memperoleh sarana yang membuat hidup berarti (Mankiw, dkk, 2013: 19). Sebagai contoh, PDB tidak mengukur kesehatan anak-anak kita, namun negara dengan PDB lebih tinggi dapat menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik, PDB tidak mengukur mutu pendidikan, namun negara dengan PDB lebih tinggi dapat menyediakan sistem pendidikan yang lebih baik. PDB tidak mengukur keindahan puisi kita, namun negara dengan PDB lebih tinggi dapat lebih mampu mengajarkan warga mereka untuk membaca dan menikmati puisi. PDB tidak memperhitungkan kecerdasan, integritas, keberanian, kebijaksanaan, atau bakti kita kepada negara, namun seluruh atribut terpuji ini lebih mudah ditanamkan apabila orang-orang tidak khawatir apabila mereka tidak dapat menikmati kebutuhan material. (Mankiw, dkk, 2013: 19)

Beberapa jenis data makroekonomi dapat digunakan untuk menilai prestasi kegiatan perekonomian suatu negara yaitu:

1. Pendapatan nasional
2. Penggunaan tenaga kerja dan pengangguran
3. Tingkat perubahan harga-harga
4. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran

Pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai dalam satu tahun tertentu atau perubahannya dari tahun ke tahun. Pendapatan nasional dapat

diukur dengan Produk Nasional Bruto dan Produk Domestik Bruto. (Sukirno, 1999: 18) Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis pertama (H₁)

H₁ : Korupsi berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara Islam.

Hipotesis kedua (H₂)

H₂ : Pendapatan nasional berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara Islam.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dimana analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan pihak lain dan telah pernah digunakan untuk menjawab permasalahan dan penelitian lain. Adapun data sekunder yang digunakan merupakan data kuantitatif (data berbentuk angka dan berdasarkan urutan waktu) dari korupsi, pendapatan nasional dan indeks pembangunan manusia pada tahun 2014.

Sifat data dalam penelitian ini adalah cross section data dengan mengambil 52 sampel data.. Kriteria sampel adalah negara anggota OKI yang datanya ada pada *transparency International* dan *World Bank*, pada tahun 2014. Rincian data yang digunakan dalam penelitian ini beserta sumbernya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data indeks persepsi korupsi / *Corruption Perception Index (CPI)* yang diperoleh dari *Transparency International*, tahun 2014.
2. Data Produk Domestik Bruto / *Gross Domestic Product (GDP)* yang diperoleh dari *World Bank*, tahun 2014.
3. Data Indeks Pembangunan Manusia yang diperoleh dari *United Nation Development Program (UNDP)*, tahun 2014.
4. Data negara-negara anggota OKI yang diperoleh dari OIC, tahun 2014.

Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier sederhana. Model analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi dengan persamaan sebagai berikut.:

$$y = a + bx_1 + cx_2 \dots\dots\dots (3)$$

dimana:

y = Pembangunan Ekonomi

a = konstanta

b = koefisien regresi x₁

c = koefisien regresi x₂

x₁ = Korupsi

x₂ = Pendapatan Nasional

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan uji asumsi klasik pada data dimana dari hasil dinyatakan bahwa data yang dipakai dinyatakan lolos uji asumsi klasik pada bab ini akan diuraikan analisis terhadap data penelitian dan pembahasan untuk masing-masing analisis serta interpretasi dari analisis yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diidentifikasi pada bab pendahuluan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda, dan diproses menggunakan SPSS 16.

4.1. Uji Hipotesis

Untuk mengukur seberapa kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikatnya, digunakan nilai Koefisien Determinasi (R²) dari hasil regresi yang dilakukan terhadap model. Koefisien Determinasi adalah angka yang menunjukkan besarnya penyebaran dari variabel bebas yang menerangkan variabel terikat. Besaran nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu.

Nilai R² yang semakin mendekati 1 (satu) artinya model tersebut dikatakan baik, karena semakin dekat hubungan antara variabel bebas dan terikatnya, yang berarti variasi variabel terikatnya hampir sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel bebas yang terdapat dalam model. Hasil regresi dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1 Hasil Regresi dan Uji Hipotesis

	Koefisien	Sig.	Kesimpulan
Korupsi	0.421	0.002	H ₀ Ditolak
Pendapatan Nasional	0.005	0.016	H ₀ Ditolak

<i>F test</i>	12.008	0.000	H ₀ Ditolak
<i>R Square</i>	: 0.330		
<i>Adj. R Square</i>	: 0.303		

Sumber: data diolah SPSS 16

Nilai R^2 dalam hasil regresi model penelitian ini adalah 0.330 yang artinya sebesar 33.0% Pembangunan Ekonomi dipengaruhi oleh variabel Korupsi dan Pendapatan Nasional sebagai variabel penentu dalam model, sedangkan sisanya sebesar 67.0% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model.

Nilai adjusted R² dari hasil pengujian regresi pada model adalah 0.303 yang artinya setelah mengalami penyesuaian, variabel bebas yakni Korupsi dan Pendapatan Nasional mampu menjelaskan variasi dari variabel pembangunan ekonomi sebesar 30.3% sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam pengujian.

Pembahasan t-statistik adalah sebagai berikut:

- Korupsi mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0.421 terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan pada korupsi maka pembangunan ekonomi akan meningkat sebesar 0.421 satuan. Nilai probabilitas yang didapat dari pengujian adalah $0,002 < 0,05$, maka H₀ ditolak yang berarti korupsi secara signifikan mempengaruhi variabel pembangunan ekonomi pada tingkat kepercayaan 95%.
- Pendapatan nasional mempunyai pengaruh yang positif sebesar 0.005 terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini berarti setiap kenaikan 1 satuan pada pendapatan nasional maka pembangunan ekonomi akan meningkat sebesar 0.005 satuan. Nilai probabilitas yang didapat dari pengujian adalah sebesar $0,016 < 0,05$, maka H₀ ditolak yang berarti pendapatan nasional mempengaruhi variabel pembangunan ekonomi pada tingkat kepercayaan 95%.

Sedangkan untuk uji F-statistik, dari hasil uji F pada tabel 4.1 di atas diketahui F-hitung sebesar 12.008 > dari F-tabel sebesar 3.19 dengan nilai signifikansi sebesar $0.000 <$

$\alpha 0.05$. maka H₀ ditolak yang berarti seluruh variabel bebas yaitu korupsi dan pendapatan nasional secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikatnya yaitu pembangunan ekonomi.

4.2 Pembahasan Hasil

Pada bagian ini akan diamati pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh koefisien parameter persamaan yang digunakan, berikut penjelasan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat.

4.2.1 Pengaruh Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel korupsi mempunyai hubungan yang positif dengan pembangunan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0.421 dan signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Ini berarti apabila korupsi naik sebesar 1% maka pembangunan ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0.421. Hasil ini sesuai dengan apa yang ada pada teori bahwa korupsi merupakan salah satu kelemahan yang akan menghambat pembangunan. Pembangunan di segala bidang terbengkalai jika tindakan korupsi dibiarkan. Dana yang sebenarnya dialokasikan guna membangun fisik dengan kualitas serta kuantitas memadai menjadi terbengkalai dengan adanya tindak korupsi ini. (Santoso, 2011: 14).

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Nasional terhadap Pembangunan Ekonomi

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pendapatan nasional mempunyai hubungan yang positif dengan pembangunan ekonomi dengan koefisien regresi sebesar 0.005 dan signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini berarti apabila pendapatan nasional naik sebesar 1% maka pembangunan ekonomi akan naik sebesar 0.005.

Dari hasil penelitian, dapat dilihat bahwa meskipun besar pengaruh variabel pendapatan nasional terhadap variabel pembangunan ekonomi relative kecil akan tetapi hal ini sesuai dengan teori yang ada bahwa salah satu masalah dalam pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi suatu negara atau peningkatan kemampuan memproduksi mengenai barang dan jasa di berbagai bidang yang semakin luas.

5. SIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh korupsi dan pendapatan nasional terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara Islam pada tahun 2014.

Dari hasil analisis, pembahasan serta pengujian hipotesis dengan menggunakan variabel korupsi dan pendapatan nasional sebagai variabel bebas, dan pembangunan ekonomi sebagai variabel terikat, seperti yang telah dilakukan pada bab 4 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- Variabel korupsi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 42.1% terhadap pembangunan ekonomi.
- Variabel pendapatan nasional mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 0.5% terhadap pembangunan ekonomi.
- Variabel korupsi dan pendapatan nasional secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 33.0% terhadap variabel pembangunan ekonomi.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini ada pada determinasi variabilitas variabel bebas terhadap variabilitas variabel terikat dimana pada model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar $33.0\% < 50\%$, artinya variabilitas variabel bebas (korupsi dan pendapatan nasional) yang digunakan dalam penelitian ini belum cukup dominan dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu pembangunan ekonomi. Sehingga perlu adanya penggantian atau penambahan variabel lain serta penambahan rentang periode waktu yang digunakan dalam penelitian agar dapat lebih menjelaskan variabilitas bebas terhadap variabilitas variabel terikat.

5.3 Implikasi

Dari penelitian ini diharapkan dapat ditarik implikasi kebijakan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemangku jabatan di ranah eksekutif maupun yudikatif dalam menindak tegas tindakan korupsi dan menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pendapatan nasional negara dimana kedua hal

tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi.

Bagi dunia akademisi diharapkan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh korupsi dan pendapatan nasional terhadap pembangunan ekonomi. Dan bagi mahasiswa diharapkan dapat menjadi tambahan literatur untuk mengembangkan riset-riset yang dilakukan di masa yang akan datang.

6. REFERENSI

- Algifari. 1997. *ANALISIS REGRESI, Teori, Kasus, dan Solusi*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Askari dan Scheherazade. *A Survey of Economic Development of OIC Countries, Economic Development and Islamic Finance*, disadur dari <http://dx.doi.org/10.1596/978-0-8213-9953-8>.
- Chapra, M. Umer. 1993. *Islam and Economic Development, A Strategy for Development with Justice and Stability*. Pakistan: Islamic Research Institute Press Islamabad. Pp. 133-154.
- Danil, Elwi. 2012. *KORUPSI, Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Cetakan kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Gujarati. 1999. *Ekonometrika Dasar*, Edisi Terjemahan, Cetakan keenam. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Hagen, Everett E. 1986. *The Economics of Development*, Fourth Edition. USA: IRWIN Homewood, Illinois 60430.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Harrison, Lawrence E. 1993. *Development and Underdevelopment, The Political Economy of Inequality* Edited by Mitchell A Seligson and John Passe-Smith. USA: Lynne Rienner Publishers, Inc.

- United Nations Development Programme. 2015. *Human Development Report 2015*, Work for Human Development Report, UNDP, United Nations Development Programme, New York USA.
- Iqbal dan Lewis. *Governance and Corruption: Can Islamic Societies and The West Learn Each Other?.* The American Journal of Islamic Sciences, 19:2. Komisi Pemberantasan Korupsi. 2007. *Buku saku untuk memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi, KORUPTOR, Dunia Akhirat dihukum*, Cetakan Pertama. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mankiw, Gregory, dkk. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro, Principles of Economics, an Asian Edition-Volume 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Prakoso, Djoko, dkk. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang merugikan dan membahayakan negara*, cetakan pertama. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Purwanto dan Dyah. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Santoso, Ibnu. 2011. *Memburu tikus-tikus Otonom, Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan ke-3. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 1999. *Pengantar Teori Makroekonomi*, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sunyoto, Danang. 2011. *Praktik SPSS untuk Kasus*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Mulia Medika.
- Supramono, Gatot. 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*, Cetakan pertama, Bandung: PT ALUMNI.
- Transparency International. 201. *Corruption Perception Index 2014, Result*, <http://www.transparency.org/cpi2014/results> diunduh 1/27/2016 10:15 AM
- Transparency International. 2016. *Home*, . Disadur dari: <http://www.transparency.org/cpi2015> diunduh 1/29/2016, 09:19 AM
- United Nations Development Program (UNDP). 2015. “*Human Development Index Data*”. Disadur dari: <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi-table>.
- United Nations Development Program (UNDP). 2016. “*Human Development Index*”. Disadur dari <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi> diunduh 1/29/2016, 09:22 AM.
- World Bank. 2015. “*GDP Data (Current \$)*”. Disadur dari: <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>. diunduh 1/29/2016, 09:20 AM.
- You, Jong-Sung. 2007. *Corruption as Injustice*. California: Delivered at The 2007 Annual Meeting of The American Political Science Association.